

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN
JL TRIPANDITA NO. 17 MAGETAN | 0351-895049

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan Tujuan	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II.....	8
2.2 Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Tujuan dan Sasaran	22
3.2 Review terhadap dokumen Perubahan RKPD	25
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	30
 BAB IV PENUTUP35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan sektor perekonomian di daerah. Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjadi acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, maupun daerah dengan daerah

Konsekuensinya adalah dituntut adanya paradigma perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan Tindak lanjutnya adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berpedoman dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2022 dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, secara spesifik akan memuat Indikasi Program dan Kegiatan bidang - bidang yang menjadi kompetensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten Magetan. Dengan penetapan rencanaini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2022.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana Capaian Kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 Ini merupakan tahun keempat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diterapkan dalam perencanaan strategis (Renstra).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 496).
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2024;

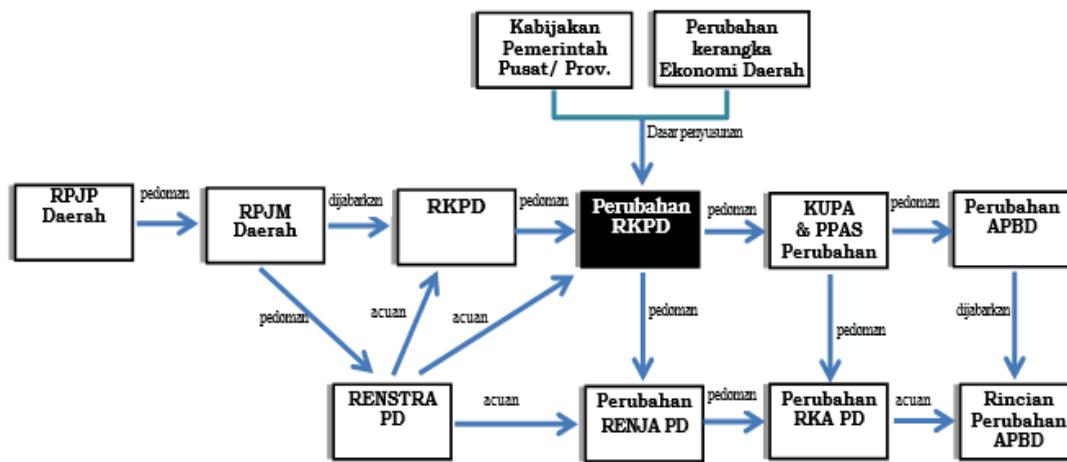
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 116);
19. Peraturan Bupati Kab. Magetan No. 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Magetan Tahun 2018-2023.
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2022; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 32);
21. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 68)
22. Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2022 Tentang Perubahan Perup RKPD Kabupaten Magetan 2022

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, Perubahan RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan RKPD merupakan RKPD induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan

Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RKPD DENGAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah
- Perubahan RKPD disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja
- Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja
- Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja SKPD yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran
- Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efektivitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk :

1. Pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD, dan selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
2. Pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyajian dokumen Perubahan Renja Kabupaten Magetan tahun 2022 terdiri dari :

TABEL 1.1

TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD KAB. MAGETAN TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan RKPD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran struktur perubahan APBD)

1.2	Dasar Hukum Penyusunan	uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan Renja SKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya.
1.4	Sistematika Dokumen RKPD	Berisi tentang sistematika penyajian/penyusunan Perubahan RKPD
1.5	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD BERJALAN		
Evaluasi Hasil RKPD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan. (kompilasi hasil capaian target kinerja RKPD dengan target RPJMD).		
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		
Memberikan kondisi ekonomi daerah, gambaran mengenai perubahan asumsi kemampuan keuangan daerah yang meliputi Perubahan asumsi Pendapatan, Perubahan asumsi Belanja, dan Perubahan asumsi Pembiayaan Daerah		
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
Kebijakan besar terhadap sasaran dan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD		
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		
Memuat Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk matrikulasi Perubahan sebelum dan ssudah disertai dengan indikator kinerja, target kinerja, lokasi, sumber dana, dan pagu anggaran		
BAB VI PENUTUP		

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 dapat diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangan dan kinerjanya.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai berikut:

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET RKPD 2022	SUMBER DATA
PERDAGANGAN				
Nilai PDRB Sektor perdagangan	Juta Rp.	3.116.120,90	2.417.898,53	BPS
Persentase Pasar Kondisi Baik	%	76	70	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah	%	0,87	0,89	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	2,57	7,11	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Persentase PK5 yang menempati tempat usaha sesuai peruntukannya	%	9,9	7,9	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Persentase Produk UKM Yang Masuk Pasar Modern	%	0	28	Dinas Perindustrian & Perdagangan
PERINDUSTRIAN				
Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	%	0,6	0,19	Dinas Perindustrian & Perdagangan
Nilai produksi industri kecil	Rp.	731.384.295.223	734.581.140.000	Dinas Perindustrian & Perdagangan

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam RKPD Tahun 2022. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka percepatan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan RKPD tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel II.2

Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu				Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau %	46	%	2,773,000,000	96	%	311,999,940												208.695652	11.25135016	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau unit	20	unit	540,000,000	3	unit	97,292,050												15	18.0170463	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UTTP yang ditera unit	28000	unit	2,028,000,000	11800	unit	214,707,890												42.1428571	10.58717406	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.3	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Perdagangan	Persentase Pelaksanaan kegiatan DAK Perdagangan %	0	0	0	0	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perdagangan	Jumlah Pedagang yang diberikan sosialisasi Pedagang	300	pedagar	205,000,000	0	0	0												0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.5	Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal		0	0	0	0	0	0												#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PELINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP Yang Ditera	46	%	295,000,000			100	%	135,000,000	42	%	56,559,200	41.90	41.90	91.08		19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera	46	%	295,000,000			9018	unit	135000000	11,289	unit	56,559,200	125.18	41.90	24,541		19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera	28000	unit	295,000,000			9000	unit	90,000,000	11,279	unit	37,322,400	125.32	41.47	40		13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
3.30.06.2.01.2	Pengawasan/Penyaluran Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera						18	ecamata	45,000,000	10	-	19,236,800	55.56	42.75	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
1.1.2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan unit	10163	unit	4,455,000,000	6601	unit	521,973,878											64.9512939	11.71658536	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1.1.2.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	30	kali	930,000,000	3	kali	153,836,100											10	16.54151613	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1.1.2.2	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang IKM	140	ikm	220,000,000	0	ikm	0											0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1.1.2.3	Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah UKM yang difasilitasi untuk mengikuti pasar lelang dan misi dagang. Pedagang	176	pedagar	470,000,000	0	pedagar	0											0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1.1.2.4	Peningkatan Sistem dan Jaringan Perdagangan (iji coba pasar)	Jumlah monitoring harga sembako Kali	260	kali	135,000,000	52	kali	24,895,000											20	18.44074074	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1.1.2.5	Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan pameran Kali	60	kali	2,700,000,000	9	kali	343,242,778											15	12.71269548	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	54	%	457,500,000			54	%	202,500,000	20	%	41,069,250	37.56	20.28	37.56		9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab					
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K					
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	54	%	374,500,000				100	%	155,000,000		13	%	20,606,000	13.29	13.29	25	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	3	unit	52,000,000				3	unit	20,000,000		2	unit	9,119,450	66.67	45.60	67	18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	156	kali	72,500,000				52	kali	45,000,000		26	kali	5,332,050	50.00	11.85	17	7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	7	kali	250,000,000				6	kali	90,000,000		-	kali	6,154,500	-	6.84	-	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	83,000,000				100	%	47,500,000		-	%	20,463,250	-	43.08	-	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	8	unit	83,000,000				6	unit	47,500,000		3	unit	20,463,250	50.00	43.08	38	25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	90	%	310,000,000				90	%	135,000,000		-	-	-	-	-	0	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Eksport Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	36	kali	310,000,000				14	kali	135,000,000		-	kali	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	36	kali	310,000,000				12	kali	90,000,000		2	kali	31,404,750	16.67	34.89	6	10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Eksport Unggulan	Jumlah pelaksanaan pameran							2	kali	45,000,000		-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab					
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K					
			Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdaga	80	%	399,000,000				80	%	265,000,000	31	%	83,393,750	39.34	31.47	39.34	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdaga	80	%	399,000,000				80	%	265,000,000	31	%	83,393,750	39.34	31.47	39	21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	21	kali	315,000,000				8	kali	230,000,000	2	kali	83,393,750	25.00	36.26	10	26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang	60	ikm	84,000,000				20	ikm	35,000,000	-	ikm		-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.3	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Cakupan PK5 yang dibina dan didata %	8.3	%	640,000,000	3	%	190,768,050								36.1445783	29.80750781		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.3.1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan Pedagang	2000	pedagar	460,000,000	205	pedagar	173,758,050								10.25	37.77348913		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.3.2	Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pedagang yang diawasi mutu dagangannya Pedagang	300	pedagar	180,000,000	84	pedagar	17,010,000									28	9.45		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.4	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau %	0	%	550,000,000	0	%	95,398,450								#DIV/0!	17.34517273		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.4.1	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekat pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah monitoring hasil tembakau yang tidak dilekat pita cukai Kali	60	kali	550,000,000	12	kali	95,398,450								20	17.34517273		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.1.5	Program Peningkatan Pasar Daerah	Percentase bangunan dan sarana penunjang pasar dalam kondisi baik %	75	%	44,720,000,000		%	9,358,667,524									121.333333	20.92725296		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.1	Operasionalisasi Pasar	Jumlah Peyediaan biaya Operasional sarana dan prasarana pasar Bulan	60	bulan	6,950,000,000	12	bulan	1,292,363,750									20	18.59516187		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.2	Rehabilitasi Pasar	Jumlah Pasar yang di rehabilitasi unit	12	unit	23,000,000,000	9	unit	7,169,740,919									75	31.1727866		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.3	Pembangunan Pasar Hewan	Jumlah Pasar Hewan yang dibangun unit	7	unit	14,000,000,000	0	unit	0									0	0		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.4	Revitalisasi Pasar (DAK)		0	unit	0	3	unit	673,319,065									#DIV/0!	#DIV/0!		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.5	Peningkatan Sumberdaya Pasar Daerah	Jumlah penyusunan dokumen pemetaan pasar daerah; dokumen	2	dokumen	200,000,000	0	dokumen	0									0	0		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu				Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Unit OPD Penanggung Jawab	
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			
			Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.5.6	Biaya Umum dan Pendampingan DAK Pasar	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan DAK Bidang Pasar %	100	%	100,000,000	50	%	10,200,000										50	10.2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.7	Pemeliharaan Gedung Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara unit	8	unit	400,000,000	4	unit	193,276,940										50	48.319235	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.1.5.8	Pemeliharaan Pasar Hewan	Jumlah pasar hewan yang dipelihara unit	15	unit	70,000,000	1	unit	19,766,850										6.66666667	28.23835714	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan saran	80	%	24,681,469,000				80	%	5,792,087,000	18	%	1,050,387,292	22.67	18.13	22.67	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan saran	80	%	24,507,875,000				80	%	5,724,587,000	18	%	1,050,387,292	22.94	18.35	23	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	16	unit	22,292,100,000				5	unit	5,049,587,000	-	unit	712,804,781	-	14.12	-	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	36	bulan	2,215,775,000				12	bulan	675,000,000	6	bulan	337,582,511	50.00	50.01	17	15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan saran	80	%	173,594,000				80	%	67,500,000	-	%	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengelolaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan	150	pk5	173,594,000				50	pk5	67,500,000	-	pk5	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bidang Perdagangan	persentase peredaran barang kena cukai ilegal yang terpantau (%)	0	%	550,000,000	0	%	95,398,450									#DIV/0!	17.34517273	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	75	%	232,500,000				75	%	85,000,000	6	%	5,151,300	8.08	6.06	8.08047059	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	232,500,000				75	%	85,000,000	6	%	5,151,300	8.08	6.06	8	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau							12	kali	35,000,000	2	-	5,151,300	16.67	14.72	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	36	kali	232,500,000				12	kali	50,000,000	-	kali	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaikan Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu				Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi				Realisasi Capaikan Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Tingkat Capaikan Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K				
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2.1.1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek %	90	%	2,630,000,000	97	%	284,262,956											107.777778	10.80847741	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.1.1	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah Industri Kecil yg memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan Design Kemasan IKM	185	ikm	1,075,000,000	36	ikm	91,233,556											19.4594595	8.486842419	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.1.2	Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pengembangan tentang managemen teknologi industri IKM	190	ikm	825,000,000	25	ikm	97,966,400											13.1578947	11.87471515	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.1.3	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah Kelompok Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan IKM	200	ikm	730,000,000	20	ikm	95,063,000											10	13.02232877	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan							30	IKM	90,000,000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
2.1.2	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Perkembangan Pelaku Usaha Industri %	90	%	1,325,000,000	78	%	341,380,650										86.6666667	25.76457736	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2.1.2.1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah Industri Kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk IKM	142	ikm	1,325,000,000	30	ikm	341,380,650										21.1267606	25.76457736	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2.1.3	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase Industri Kecil yang menerapkan teknologi Industri %	100	%	3,335,000,000	96	%	430,617,100										96	12.91205697	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2.1.3.1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah Industri Kecil yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan IKM	460	ikm	1,350,000,000	15	ikm	141,690,150										3.26086957	10.49556667	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu				Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
			K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp			
			Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Satuan	Volume	Rp	Volume	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelakau usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	175	ikm	4,790,730				80	ikm	656,600,000	55	ikm	307,443,850	68.75	46.82	31	6,417	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	3	dokumen	155,000,000				1	dokumen	45,000,000	-	dokumen	29,611,450	-	65.80	-	-	19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.4	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah Senta Industri Kecil yang berkembang sentra	10	sentra	240,000,000	0	sentra	0	0	sentra								0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.4.1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah sentra industri potensial yang dilakukan pendataan Industri Kecil sentra	50	sentra	240,000,000	0	sentra	0	0	sentra								0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	persentase Kelompok alih profesi yang dibina dan berikan bantuan produksi %	100	%	6,115,000,000	54	%	757,994,050	%									54	12.39565086	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.5.1	Pembinaan dan Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih kelompok	40	kelompok	2,305,000,000	9	kelompok	481,552,050		kelompok								22.5	20.89162907	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.5.2	Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat / Kelompok Masyarakat	Jumlah kelompok yang diberikan bantuan sarana produksi kelompok	37	kelompok	990,000,000	3	kelompok	144,002,000										8.10810811	14.54565657	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.5.3	Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri Masyarakat	Fasilitasi Pameran produk kerajinan dan hasil pelatihan kelompok	73	kelompok	820,000,000	28	kelompok	132,440,000										38.3561644	16.15121951	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
2.1.5.4	Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	Jumlah Pasar yang dipelihara/rehab unit	4	unit	2,000,000,000	0	unit	0										0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)	90	%	1,200,000,000	%		90	%	295,000,000	-	%	-	-	-	-	0.00	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	90	%	1,200,000,000	%		90	%	295,000,000	-	%	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	220	ikm	837,000,000			80	ikm	270,000,000	-	ikm	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab							
			K		Rp		K		Rp		K									
			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3.31.04.201.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Persentase kelompok alih profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	300	ikm	363,000,000				20	ikm	25,000,000	-	ikm		-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.1.6	Program penataan struktur industri	Luas pembebasan lahan untuk pembangunan LIK II Ha	5	ha	5,000,000,000	0	ha	50,000,000								0	0.960975	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
2.1.6.1	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	Luas Lahan yang dibebaskan Ha	5	ha	5,000,000,000	1	dokumen	50,000,000								20	0.960975	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat Skor	77.5	skor	3,845,280,000	77.478	skor	553,695,982								99.9716129	14.39936707	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran %	100	%	2,875,280,000	92	%	439,486,438								92	15.28499617	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase jumlah pelayanan Perjalanan dinas %	100	%	855,000,000	100	%	94,539,944								100	11.05730339	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
1.1.1.3	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat dokumen	5	dokumen	115,000,000	1	dokumen	19,669,600								20	17.104	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat 	75	skor	27,756,844,530			skor		75	skor	9,584,867,735	77.12	skor	3,647,080,284	102.83	38.05	102.826667	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	99,300,000			skor		75	skor	33,000,000	7	skor	2,395,000	9.68	7.26	10	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	21	laporan	71,300,000			laporan		7	laporan	23,000,000	-	laporan	880,000	-	3.83	-	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	18	dokumen	28,000,000			dokumen		6	dokumen	10,000,000	-	dokumen	1,515,000	-	15.15	-	5	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.202.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	19,582,959,830				75	skor	5,871,573,235	31	skor	2,629,898,641	41.22	44.79	41	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	6	laporan	14,000,000				2	laporan	5,000,000	-	laporan	780,000	-	15.60	-	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.201.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	%	19,568,959,830				100	%	5,866,573,235	50	%	2,629,118,641	50.00	44.82	50	13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.204.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	2,746,491,500				75	skor	912,652,500	77	skor	104,214,600	102.83	11.42	103	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.204.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100	%	62,000,000				100	%	20,000,000	-	%	1,415,000	-	7.08	-	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.204.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	100	%	2,684,491,500				100	%	892,652,500	25	%	102,799,600	25.00	11.52	25	4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2022 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab				
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp					
			Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan		Volume	Satuan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.31.01.2.05	F		75	skor	93,500,000			75	skor	735,000,000	77	skor	-	102.83	-	103	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	105	pns	52,000,000			35	pns	20,000,000	-	pns	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	38	pns	41,500,000			18	pns	715,000,000	-	kali	-	-	-	-	-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	1,288,163,000			75	skor	359,600,000	77	skor	101,678,512	102.83	28.28	103	8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	111,600,000			12	bulan	30,000,000	6	bulan	7,500,000	50.00	25.00	17	7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	88,000,000			12	bulan	25,000,000	6	bulan	5,252,000	50.00	21.01	17	6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	60,760,000			12	bulan	19,600,000	6	bulan	6,480,600	50.00	33.06	17	11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	93,000,000			12	bulan	25,000,000	6	bulan	2,759,150	50.00	11.04	17	3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran ~Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	48	unit	435,053,000			16	unit	125,000,000	-	unit	10,167,000	-	8.13	-	2	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	42,500,000			12	bulan	15,000,000	6	bulan	3,935,850	50.00	26.24	17	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dan pelayanan perjalanan dinas	36	bulan	457,250,000			12	bulan	120,000,000	2	bulan	65,583,912	12.50	54.65	4	14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	3,699,670,200			75	skor	1,533,442,000	49	skor	758,312,531	65.94	49.45	66	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	792,050,000			12	bulan	215,500,000	6	bulan	72,442,531	50.00	33.62	17	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	36	bulan	2,845,620,200			12	bulan	1,297,942,000	6	bulan	680,560,000	50.00	52.43	17	24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	105	unit	62,000,000			35	unit	20,000,000	10	unit	5,310,000	28.57	26.55	10	9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	246,760,000			75	skor	139,600,000	36	skor	50,581,000	48.31	36.23	48	20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6	unit	139,500,000			2	unit	45,000,000	1	unit	11,570,000	50.00	25.71	17	8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	57	unit	107,260,000			19	unit	34,600,000	8	unit	7,281,000	42.11	21.04	14	7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		unit				1	unit	40,000,000	1	unit	31,730,000	100.00	79.33	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		unit				1	unit	20,000,000	-	unit	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					74,590,204,260					17,991,054,735			5,496,316,120	42.82	30.55	1479.73	7.37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

2.2 Telaah Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan

Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam RKPD dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Evaluasi RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan I program dan kegiatan tahun 2022 pada tiap SKPD dengan capaian yang harus dicapai pada RKPD tahun 2022 dalam satuan persentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra SKPD. Adapun data tersaji pada Tabel II. 3 dibawah ini:

Tabel II.3
Telaah Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tribulan II Tahun 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB MAGETAN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan anggaran Renja SKPD		Raihan Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang diwujudkan		Keterangan	
			Tahun Pelajaran Tahun K		K			
			Volume	Satuan	Volume	Satuan		
1	2	3	10	11	13	14	20	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP Yang Ditera	100	%	42	%		
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera	9018	unit	11,289	unit		
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera	9000	unit	11,279	unit	Dilakukan tera/ tera ulang di wilayah - wilayah desa dan kecamatan	
3.30.06.2.01.2	Pengawasan/Penyalinan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera	18	kecamatan	10	-	Dilakukan sosialisasi terkait tera agar masyarakat tertib ukur	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	54	%	20	%		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	13	%		
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	3	unit	2	unit		
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	52	kali	26	kali	Kegiatan dilaksanakan rutin	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pasar murah dan pujasera Kali	6	kali	-	kali	Pelaksanaan kegiatan mengikuti event - event untuk upaya stabilisasi harga	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi	100	%	-	%		
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah/Jenis Barang yang dipantau	6	unit	3	unit	Dilaksanakan per tribulan	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaksanaan Pameran	90	%	-	-		
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	14	kali	-	kali		
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	12	kali	2	kali	Kegiatan mengikuti event - event yang ada	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan pameran	2	kali	-	-	Kegiatan mengikuti dari provinsi	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan	80	%	31	%		
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan	80	%	31	%		
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	8	kali	2	kali	Kegiatan mengikuti event - event yang ada	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi UKM /pedagang	20	ikm	-	ikm	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	18	%		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	18	%		
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	5	unit	-	unit	Rehabilitasi pasar baru selesai proses lelang	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin setiap bulan	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase peningkatan sarana distribusi	80	%	-	%		
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendataan	50	pk5	-	pk5	Pelaksanaan kegiatan pembinaan pedagang menyesuaikan jadwal dari narasumber	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	75	%	6	%		

3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75	%	6	%	
3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	12	kali	2	kali	Pelaksanaan rutin dilaksanakan tiap bulan menyesuaikan jadwal dengan tim pelaksana
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	12	kali	-	kali	Pelaksanaan rutin dilaksanakan tiap bulan menyesuaikan jadwal dengan tim pelaksana
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Percentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek			-	-	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	
3.31.03.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan	30	ikm	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Percentase perkembangan pelaku usaha industri	90	%	41	%	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Percentase Perkembangan pelaku usaha industri, Percentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	90	%	41	%	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Penwiliyahan Industri	Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan dan bantuan peralatan	0	ikm	-	ikm	-
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pengembangan tentang teknologi industri	60	ikm	-	-	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Percentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Percentase Perkembangan pelaku usaha industri, Percentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	120	ikm	20	ikm	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Percentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Percentase Perkembangan pelaku usaha industri, Percentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	80	ikm	55	ikm	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	1	dokumen	-	dokumen	-
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase Industri kecil yang dibina dan berikan bantuan produksi (%)	90	%	-	%	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase kelompok ahli profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	90	%	-	%	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Percentase kelompok ahli profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	80	ikm	-	ikm	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIIINas	Percentase kelompok ahli profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi	20	ikm	-	ikm	Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan jadwal dari narasumber
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Angka	75	skor	77.12	skor	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	7	skor	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7	laporan	-	laporan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6	dokumen	-	dokumen	Kegiatan rutin

3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	31	skor	
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	2	laporan	-	laporan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	%	50	%	Kegiatan rutin
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	77	skor	
3.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100	%	-	%	Kegiatan rutin
3.31.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	100	%	25	%	Kegiatan rutin
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		75	skor	77	skor	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	35	pns	-	pns	Kegiatan rutin
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	18	kali	-	kali	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	77	skor	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran - Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	16	unit	-	unit	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase dan pelayanan perjalanan dinas	12	bulan	2	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	49	skor	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	6	bulan	Kegiatan rutin
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara	35	unit	10	unit	Kegiatan rutin
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75	skor	36	skor	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2	unit	1	unit	Kegiatan rutin
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19	unit	8	unit	Kegiatan rutin
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit	1	unit	Kegiatan rutin
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	unit	-	unit	Kegiatan rutin

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 disusun berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan dalam forum musrenbang melibatkan berbagai pihak, kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan prioritas pembangunan juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya financial.

Penyusunan Perubahan RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2022 tetap mangacu pada RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2022, yang merupakan tahun keempat dari periodesasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023. Arah kebijakan tahun keempat RPJMD diprioritaskan Peningkatan nilai tambah untuk memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi.

Tabel 3.1

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2018-2023

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan kinerja birokrasi berbasis IT dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah	Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik dan pendukung perekonomian daerah	Peningkatan produktivitas usaha ekonomi produktif melalui triple agro (agro wisata, agro industri dan agro bisnis)	Peningkatan nilai tambah untuk memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi	Peningkatan ekspansi pasar untuk memperkokoh eksistensi produk lokal

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2019-2023

	Tujuan	Sasaran			Strategi		Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kegiatan sektor perdagangan	1.1	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1.1.1	Mengembangkan kapasitas pedagang dan sarana/prasarana pasar tradisional	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional
						1.1.1.2	Penataan dan pembinaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Magetan
				1.1.2	Meningkatkan pangsa pasar produk unggulan kabupaten Magetan	1.1.2.1	Dilaksanakan pameran di tingkat Regional maupun Nasional
				1.1.3	Menjaga Kualitas Keamanan, ketersediaan, dan kelancaran arus barang	1.1.3.1	Dilakukan tera/tera ulang semua Potensi UTTP di kabupaten magetan
2	Meningkatnya pertumbuhan industri	2.1	Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil	2.1.1	Mengembangkan industri skala kecil sehingga dapat memberi nilai tambah produk IKM di Kab. Magetan	2.1.1.1	Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap industri kecil
						2.1.1.2	Meningkatkan Penguasaan Iptek dan Inovasi dalam rangka peningkatan kualitas mutu produk hasil IKM
						2.1.1.3	Mengembangkan industri yang mengarah kepada pengolahan hasil pertanian dan produk unggulan

Tabel 3.3
TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

NO	ASPEK / FOKUS/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PERINTAHAN DAERAH	SATU AN	TARGET RKPD 2022	TARGET 2022 PERIODESAI P-RPJMD	TARGET P- RKPD 2022	SUMBER DATA	KETERA NGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
	PERDAGANGAN						
	Nilai PDRB Sektor perdagangan	Juta Rp.	2.417.989,53	2.417.898,53	2.417.898,53	BPS	
	Persentase Pasar Kondisi Baik	%	70	70	70	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	Rasio ketersediaan los/bedak di pasar daerah	%	0,89	0,89	0,89	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	Pertumbuhan Usaha Perdagangan	%	7,11	7,11	7,11	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	Percentase PK5 yang menempati tempat uaha sesuai peruntukannya	%	7,9	7,9	7,9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	Percentase Produk UKM Yang Masuk Pasar Modern	%	28	28	28	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	PERINDUSTRIAN						
	Pertumbuhan Industri Kecil Kabupaten Magetan	%	0,19	0,19	0,19	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
	Nilai produksi industri kecil	Rp.	724.581.140.000	724.581.140.00	724.581.140.000	Dinas Perindustrian & Perdagangan	

3.2 Review terhadap dokumen Perubahan RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya , serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase peningkatan sarana distribusi		80%		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase peningkatan sarana distribusi		80%		
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	Kabupaten Magetan	5 Pasar	7,191,000,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang direhabilitasi dan dipelihara	Kabupaten Magetan	5 Pasar	7,191,000,000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	Kabupaten Magetan	12 bulan	750,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	Kabupaten Magetan	12 bulan	750,000,000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Percentase peningkatan sarana distribusi		80%		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Percentase peningkatan sarana distribusi		80%		
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan	Kabupaten Magetan	25 PK5	75,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan	Kabupaten Magetan	25 PK5	75,000,000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		7,10%		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		7,10%		
4	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	12 kali	35,000,000	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	12 kali	35,000,000	
5	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	12 kali	75,000,000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	12 kali	75,000,000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi		54%		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi		54%		
6	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	1 unit	20,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	1 unit	20,000,000	
7	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	Kabupaten Magetan	52 Kali	25,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah monitoring harga sembako	Kabupaten Magetan	52 Kali	25,000,000	
8	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pasar jurah dan pujasera	Kabupaten Magetan	2 Kali	100,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pasar jurah dan pujasera	Kabupaten Magetan	2 Kali	100,000,000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi		54%		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau/percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau/jumlah pedagang yang diberikan sosialisasi		54%		
9	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	3 unit	30,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah / jenis barang yang dipantau	Kabupaten Magetan	3 unit	30,000,000	

Tabel 3.4											
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022											
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
(1)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada	Jumlah pelaksanaan pameran		90%		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada	Jumlah pelaksanaan pameran		90%		
10	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	Kabupaten Magetan	12 kelompok	100,000,000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	Kabupaten Magetan	12 kelompok	100,000,000	
11	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan misi dagang	Kabupaten Magetan	2 Kali	50,000,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan misi dagang	Kabupaten Magetan	2 Kali	50,000,000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera		100%		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera		100%		
12	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera	Kabupaten Magetan	8000 Unit	100,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang ditera	Kabupaten Magetan	8000 Unit	100,000,000	
13		Jumlah UTTP yang ditera	Kabupaten Magetan	18 Kecamatan	50,000,000		Jumlah UTTP yang ditera	Kabupaten Magetan	18 Kecamatan	50,000,000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan		80%		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha perdagangan		80%		
14	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk	Jumlah pelaksanaan pameran	Kabupaten Magetan	8 Kali	150,000,000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk	Jumlah pelaksanaan pameran	Kabupaten Magetan	8 Kali	150,000,000	
15	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi UKM / pedagang	Kabupaten Magetan	20 IKM	40,000,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi UKM / pedagang	Kabupaten Magetan	20 IKM	40,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparat yang layak fungsi		75%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparat yang layak fungsi		75%		
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang dihasilkan	Kabupaten Magetan	6 dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan laporan keuangan yang dihasilkan	Kabupaten Magetan	6 dokumen	10,000,000	
17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen survey IKM				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen survey IKM				
		Jumlah Laporan	Kabupaten Magetan	1 Dokumen	23,000,000		Jumlah Laporan	Kabupaten Magetan	1 Dokumen	23,000,000	

Tabel 3.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. MAGETAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	100%	6,312,567,687	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	100%	6,312,567,687	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Kabupaten Magetan	2 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan	Kabupaten Magetan	2 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		
20	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	Kabupaten Magetan	100%	865,965,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	Kabupaten Magetan	100%	865,965,000	
21	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	Kabupaten Magetan	100%	20,000,000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya pelayanan pengelolaan retribusi daerah	Kabupaten Magetan	100%	20,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana		75%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana		75%		
22	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang ikut diklat	Kabupaten Magetan	2 PNS	15,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang ikut diklat	Kabupaten Magetan	2 PNS	15,000,000	
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Magetan	35 PNS	20,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Kabupaten Magetan	35 PNS	20,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		
24	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya pelayanan	Kabupaten Magetan	12 Bulan	30,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya pelayanan	Kabupaten Magetan	12 Bulan	30,000,000	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Magetan	16 Unit		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten Magetan	16 Unit		
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	15,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	15,000,000	
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	30,000,000	
28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	19,600,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	19,600,000	
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	36,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	36,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase jumlah pelayanan Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	Kabupaten Magetan	100% 75%	147,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase jumlah pelayanan Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	Kabupaten Magetan	100% 75%	147,500,000	
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	255,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	255,500,000	
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	Kabupaten Magetan	35 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	Kabupaten Magetan	35 Unit	20,000,000	
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	917,942,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten Magetan	12 Bulan	917,942,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		75%		
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Magetan	2 Unit	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kabupaten Magetan	2 Unit	45,000,000	
35		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Magetan	19 unit	34,600,000		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kabupaten Magetan	19 unit	34,600,000	
36	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magetan	1 Gedung	80,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magetan	1 Gedung	80,000,000	
37	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magetan	1 Gedung	40,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kabupaten Magetan	1 Gedung	40,000,000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan		90%		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Percentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan		90%		
38	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi	Kabupaten Magetan	50 IKM	240,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi	Kabupaten Magetan	50 IKM	240,000,000	
39		Jumlah dokument AMDAL		3 KUB 1 Dokumen AMDAL			Jumlah dokument AMDAL		3 KUB 1 Dokumen AMDAL		
		Jumlah industri kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk					Jumlah industri kecil yang mendapat pembinaan, bantuan peralatan dan uji coba produk				
		Jumlah operasional kegiatan akademi teknologi kulit di magetan	Kabupaten Magetan	40 IKM 1 Paket	500,000,000		Jumlah operasional kegiatan akademi teknologi kulit di magetan	Kabupaten Magetan	40 IKM 1 Paket	500,000,000	
40	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok industri kecil Jumlah kelompok industri yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan	Kabupaten Magetan	15 IKM		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Percentase industri kecil yang mendapatkan pembinaan, diklat dan bantuan peralatan	Kabupaten Magetan	15 IKM		
41	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	Kabupaten Magetan	13 KUB	471,600,000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	Kabupaten Magetan	13 KUB	471,600,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA					
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji	Kabupaten Magetan	30 IKM	100,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/merk, Halal, Uji	Kabupaten Magetan	30 IKM	100,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase kelompok ahli profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi		90%		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase kelompok ahli profesi yang dibina dan diberikan bantuan produksi		90%		
43	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah kelompok yang diberikan Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih	Kabupaten Magetan	2 kelompok 60 orang	270,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah kelompok yang diberikan Jumlah kelompok yang dibina dan dilatih	Kabupaten Magetan	2 kelompok 60 orang	270,000,000	
44	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Tersedianya pendamping pembangunan rumah promosi	Kabupaten Magetan	100%	30,000,000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Tersedianya pendamping pembangunan rumah promosi	Kabupaten Magetan	100%	30,000,000	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan diperlukan focus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki focus tujuan sehingga hasil yang dicita citakan dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2022 adalah usulan program dan kegiatan harus bersifat mendesak dan prioritas untuk mencukupi kebutuhan operasional rutin SKPD sehingga pelaksanaan tupoksi tidak terganggu, memacu pencapaian target capaian kinerja dan pencapaian target RPJMD, mencukupi belanja wajib / prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD induk 2022, penyesuaian terhadap program / kegiatan Kabupaten yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2022.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut tersaji dalam table 3.5:

TABEL 3.5
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DISPERINDAG KABUPATEN MAGETAN											PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11(10-9)	13	14	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau (%)	75%	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,000,000	100,000,000	15,000,000	75%	88,500,000	
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	75%	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,000,000	100,000,000	15,000,000	75%	88,500,000	
3.30.02.2.06	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	12 kali	8 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	50,000,000	15,000,000	8 kali	38,500,000	
3.30.02.2.06	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau	12 kali	12 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	0	12 kali	50,000,000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Percentase peningkatan dan sarana distribusi	85%	85%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,792,087,000	12,208,368,550	6,416,281,550	85%	5,577,000,000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Percentase peningkatan dan sarana distribusi	85%	85%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,724,587,000	11,565,868,550	5,841,281,550	85%	5,102,000,000	
3.30.03.2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki/diatur dan dipelihara	5 pasar	20 pasar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,049,587,000	9,771,718,550	4,722,131,550	6 pasar	4,362,000,000	
3.30.03.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penyediaan biaya operasional sarana dan prasarana pasar	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	675,000,000	1,794,150,000	1,119,150,000	12 bulan	740,000,000	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Percentase peningkatan dan sarana distribusi	85%	85%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,500,000	642,500,000	575,000,000	85%	475,000,000	
3.30.03.2.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang memperoleh pembinaan dan pendidikan	50 pedagang	90 pedagang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,500,000	642,500,000	575,000,000	90 pedagang	475,000,000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Percentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terpantau	54%	54%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,500,000	395,000,000	192,500,000	54%	301,750,000	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Percentase peredaran barang	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	335,000,000	180,000,000	100%	249,500,000	
3.30.04.2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah jenis barang yang dipantau	3 Unit	4 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	40,000,000	20,000,000	4 unit	80,000,000	
3.30.04.2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting pada pasar rakyat	52 kali	52 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	145,000,000	100,000,000	52 kali	49,500,000	
3.30.04.2.02	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus serta pujasera	6 kali	6 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	150,000,000	60,000,000	4 kali	120,000,000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Percentase peredaran barang	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,500,000	60,000,000	12,500,000	100%	52,250,000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan pengawasan penyaluran, penggunaan pupuk dan pestisida	6 kali	6 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,500,000	60,000,000	12,500,000	6 kali	52,250,000	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Percentase Pelaksanaan Pameran dan misi dagang	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	250,000,000	115,000,000	90%	120,000,000	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelaksanaan Pameran dan misi dagang	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	250,000,000	115,000,000	90%	120,000,000	
3.30.05.2.01	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaksanaan pameran	12 kali	6 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	150,000,000	60,000,000	6 kali	75,000,000	
3.30.05.2.01	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan misi dagang bagi IKM	2 kali	4 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	100,000,000	55,000,000	2 kali	45,000,000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Percentase UTTP Yang Ditera	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	400,000,000	265,000,000	100%	200,000,000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Percentase UTTP Yang Ditera	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	400,000,000	265,000,000	100%	200,000,000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan UTTP yang ditera	9000 unit	15000 unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	310,000,000	220,000,000	20000 unit	125,000,000	
3.30.06.2.01	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan dan penyuluhan metrologi legal	18 Kecamatan	30 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	90,000,000	45,000,000	30 kali	75,000,000	

TABEL 3.5
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DISPERINDAG KABUPATEN MAGETAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN		TARGET	LOKASI			PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11(9)	13	14
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaksanaan pameran dan pembinaan pelaku usaha perdagangan	80%	80%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,000,000	450,000,000	185,000,000	80%	238,500,000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan pameran dan pembinaan pelaku usaha perdagangan	80%	80%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,000,000	450,000,000	185,000,000	80%	238,500,000
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pameran	8 kali	8 kali	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	350,000,000	120,000,000	8 kali	200,000,000
3.30.07.2.01	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perdagangan	20 IKM	40 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	100,000,000	65,000,000	20 IKM	38,500,000
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,5 Skor	78,5 Skor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,584,867,735	9,498,629,129	-86,238,606	78,5 Skor	7,513,628,701
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,000,000	25,000,000	-8,000,000	75%	31,000,000
3.31.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	0	6 dokumen	11,000,000
3.31.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	7 laporan	7 laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,000,000	15,000,000	-8,000,000	7 laporan	20,000,000
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,871,573,235	5,790,248,829	-81,324,406	75%	3,854,604,701
3.31.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,866,573,235	5,785,248,829	-81,324,406	100%	3,849,104,701
3.31.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan	2 laporan	2 laporan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	0	2 laporan	5,500,000
3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	912,652,500	635,938,300	-276,714,200	75%	499,374,000
3.31.01.2.04	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	892,652,500	615,938,300	-276,714,200	100%	477,374,000
3.31.01.2.04	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	0	100%	22,000,000
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	735,000,000	55,000,000	-680,000,000	75%	39,000,000
3.31.01.2.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang - undangan	18 PNS	18 PNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	715,000,000	35,000,000	-680,000,000	18 orang	17,000,000
3.31.01.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	35 PNS	2 PNS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	0	35 orang	22,000,000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359,600,000	776,500,000	416,900,000	75%	453,200,000
3.31.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	0	12 bulan	29,700,000
3.31.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Unit	40 unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	443,500,000	318,500,000	16 unit	172,000,000
3.31.01.2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	0	12 bulan	17,000,000
3.31.01.2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	28,000,000	3,000,000	12 bulan	27,500,000
3.31.01.2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,600,000	25,000,000	5,400,000	12 bulan	21,600,000
3.31.01.2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	40,000,000	10,000,000	12 bulan	35,400,000
3.31.01.2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	200,000,000	80,000,000	12 bulan	150,000,000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,533,442,000	1,886,342,000	352,900,000	75%	2,493,450,000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,500,000	185,500,000	-30,000,000	12 bulan	240,000,000
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	35 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	0	35 unit	22,020,000

TABEL 3.5
Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2022

NAMA PERANGKAT DAERAH : DISPERINDAG KABUPATEN MAGETAN			RENCANA TAHUN 2022							PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF						TARGET CAPOAAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
			TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	LOKASI	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
3.31.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,297,942,000	1,680,842,000	382,900,000	12 bulan	2,231,430,000
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana aparat yang layak fungsi	75%	75%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,600,000	329,600,000	190,000,000	75%	143,000,000
3.31.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	45,000,000	0	2 unit	50,000,000
3.31.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 Unit	19 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,600,000	34,600,000	0	19 unit	33,000,000
3.31.01.2.09 .09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	2 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	200,000,000	160,000,000	1 unit	40,000,000
3.31.01.2.09 .10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	2 Unit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	50,000,000	30,000,000	1 unit	20,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perkembangan pelaku usaha industri	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,496,600,000	4,421,391,000	2,924,791,000	90%	1,575,000,000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri kecil yang mendapatkan implementasi iptek, Persentase Perkembangan pelaku usaha industri, Persentase industri kecil yang menerapkan teknologi industri, Jumlah sentra industri kecil yang berkembang	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,496,600,000	4,421,391,000	2,924,791,000	90%	1,575,000,000
3.31.02.2.01 .03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pengembangan tentang teknologi industri	60 IKM	60 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	125,000,000	0	60 IKM	265,000,000
3.31.02.2.01 .04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah industri kecil yang menerapkan teknologi industri	120 IKM	180 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	670,000,000	1,509,500,000	839,500,000	120 IKM	615,000,000
3.31.02.2.01 .05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kecil yang mendapatkan pembinaan untuk pengembangan usaha	80 IKM	195 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	656,600,000	2,611,891,000	1,955,291,000	80 IKM	645,000,000
3.31.02.2.01 .06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen pengumpulan data industri	1 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	175,000,000	130,000,000	1 dokumen	50,000,000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	881,000,000	791,000,000	90%	50,000,000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri Kecil yang mendapatkan implementasi iptek	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	881,000,000	791,000,000	90%	50,000,000
3.31.03.2.01 .01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat HKI/Merk, Halal, Uji Nutrisi dan design Kemasan	30 IKM	40 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	881,000,000	791,000,000	30 IKM	50,000,000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295,000,000	540,000,000	245,000,000	90%	278,000,000
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Industri kecil yang dibina dan diberikan bantuan produksi (%)	90%	90%	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295,000,000	540,000,000	245,000,000	90%	278,000,000
3.31.04.2.01 .01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII Nas)	Jumlah IKM yang dibina dan diberikan bantuan produksi	80 IKM	2 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270,000,000	515,000,000	245,000,000	2 IKM	250,000,000
3.31.04.2.01 .02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SII Nas	Jumlah IKM yang terfasilitasi penerapan SII Nas	20 IKM	2 IKM	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	0	2 IKM	28,000,000
JUMLAH							18,081,054,735	29,144,388,679	11,063,333,944		15,942,378,701

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022. Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 dibidang industry dan perdagangan.

Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD tahun 2022 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2022;
2. Perubahan RKPD tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Semoga dokumen ini dan memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dan melaksanakan program pembangunan dibidang industri dan perdagangan di kabupaten Magetan.

Magetan, Agustus 2022

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan

